

PERSPEKTIF KEBERHASILAN PENUMBUHAN ENAM JUTA USAHA BARU

Oleh :
Ir. Sri Lestari Hs., MM¹⁾

Pendahuluan

Para ekonom penganut faham neoklasik memiliki suatu keyakinan bahwa dalam suatu struktur perekonomian yang menggunakan pendekatan pasar bebas akan terjadi proses penetasan kebawah (*trickle down effect*) dan ke samping (*spread effect*). Namun dari berbagai fenomena pembangunan di negara-negara berkembang memperlihatkan bahwa proses tersebut hampir tidak pernah terjadi, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah penghisapan dari atas ke bawah, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun sumberdaya ekonomi lainnya. Peristiwa tersebut nampaknya merupakan suatu kejanggalan, tetapi bila disimak lebih jauh akan terlihat bahwa teori ekonomi yang dimotori oleh *Adam Smith* tidak mengasumsikan waktu dan unsur-unsur ekonomi lainnya sebagai faktor strategis (faktor lain dianggap tetap/given), namun hanya membangun asumsi semata-mata bersandar pada sisi penawaran dan permintaan saja. Dengan perkataan lain teori ekonomi yang didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi semata tidak dapat menjawab fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan pendekatan ekonomi yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan sosial.

Kondisi faktural tersebut juga terjadi di Indonesia pada era orde baru yang lalu, yang terbukti hanya memperbesar kesenjangan dan tidak mampu mengatasi goncangan perekonomian dunia. Dampak akhir yang terlihat adalah semakin membesarnya kesenjangan dan terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan, mengindikasikan ketidakmampuan usaha besar untuk mengantisipasi terjadinya gejolak perekonomian dunia. Dalam kondisi yang demikian ternyata usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM) lebih mampu bertahan. Hal tersebut antara lain terlihat dari jumlah UMKM yang pada waktu tahun pertama krisis moneter hanya menurun sebanyak 1,529 juta orang atau 4 (empat persen), dan volume usahanya hanya menurun sebanyak 11.413 miliar rupiah atau 2,91 persen. Kondisi penurunan tersebut juga tidak bertahan lama karena pada tahun ke 3 (tahun 2000) UMKM baik jumlah maupun volume usahanya telah meningkat lagi. Jumlah UMKM menjadi 41,212 juta Orang (meningkat 5,12%), dengan volume usaha mencapai 45.631 miliar rupiah atau naik 8,4.persen. Demikian juga sumbangannya terhadap GNP meningkat dari 39,41 % tahun 1998 menjadi 40,47 di tahun 2000. Fenomena menarik lainnya adalah pada tahun 2005 data dari BPS memperlihatkan bahwa jumlah UMKM meningkat menjadi 44.689.588.

¹⁾ Penulis adalah pejabat eselon IV Deputi Bidang Pengkajian Pemberdayaan UMKK

Dengan prosentase peningkatan yang cukup signifikan untuk usaha mikro sebesar 3,02 % per tahun dan dengan penyebaran yang merata ke seluruh pelosok tanah air. Meningkatnya jumlah usaha UMKM memungkinkan : 1) usaha mikro menjadi sumber utama pendapatan masyarakat kecil ; 2) semakin tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi riil di daerah-daerah terutama di pedesaan; 3) meningkatnya daya dukung ekonomi lokal yang akan memperbaiki PDRB, pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan dan ; 4) semakin meningkatnya infra struktur ekonomi di daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah (PDRB).

Jika diperhatikan fenomena nampak bahwa teori ekonomi klasik ternyata tidak dapat memprediksi atau menerangkan pengaruh dari kejadian/perubahan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam teori tersebut banyak unsur yang dianggap sebagai faktor tetap (*given*) yang tidak diperhitungkan dalam kalkulus perencanaan suatu kebijakan ekonomi. Beberapa faktor utama yang sering dianggap *given* adalah ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan kelembagaan, Sedangkan dari pengalaman pembangunan di banyak negara berkembang Lewis (1978) berpendapat bahwa faktor ini sangat berpengaruh besar. Hal ini pulalah yang menjadi dasar pemikiran tentang pentingnya pembangunan dan perkuatan usaha UMKM yang terutama UMKM yang berbasis tenaga kerja dan bahan baku lokal. Demikian pula jika dilihat dari struktur perekonomian bangsa Indonesia faktor-faktor tersebut merupakan kekayaan nasional yang dapat dijadikan modal pembangunan ekonomi partisipatif mengalokasikan sumberdaya yang tersedia

secara efisien. Dengan perkataan lain seharusnya pendekatan optimalitas sumberdaya tersedia merupakan misi yang harus dilaksanakan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memperbesar kesempatan, peran dan tanggung jawab UMKN. Hal ini karena hanya kelompok ini yang memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya lokal, yang didominasi ketersediaan tenaga kerja dan lahan yang cukup luas.

Kebijakan Penetapan Target Enam Juta Wirausaha Baru.

Pilihan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pembukaan usaha baru memang patut mendapat dukungan dari semua mengingat jumlah kemiskinan sekarang ini dilaporkan oleh BPS telah mencapai 40 juta jiwa, sedangkan pengangguran telah mencapai 17 juta orang. Di sisi yang lain harus diakui bahwa ragam usaha dari kelompok usaha mikro dan usaha kecil memang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang begitu besar karena: a) Sebagian besar bahan baku produksi merupakan produk lokal; b) tidak memerlukan keahlian dan teknologi produksi modern; c) modal yang diperlukan relatif kecil; d) selang waktu produksi (*time lag*) yang relative pendek serta ICOR yang relatif rendah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran memang sudah sangat tepat dan dengan berpedoman pada Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menetapkan target penumbuhan usaha baru sebanyak enam juta.

Target yang sangat optimistis ini nampaknya cukup wajar mengingat program-program untuk mendukung target terse-

but juga banyak, mulai dari penumbuhan iklim usaha, perkuatan dibidang permodalan produksi dan pemasaran sampai dengan dengan perkuatan di bidang teknologi informasi. Yang jadi pertanyaan apakah program-program pendukung tersebut telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi calon UMKM yang sebagian besar adalah mereka yang tidak punya keahlian, tidak punya modal dan tidak punya informasi untuk membuka usaha mandiri. Kajian dari aspek kesiapan pemerintah, terutama dari Pemerintah pusat tidak menimbulkan keraguan akan keberhasilan program tersebut, tetapi dengan memperhatikan kondisi lapang yang memperlihatkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi UKM, yang belum dapat dieliminir oleh kebijakan pemerintah menimbulkan keraguan, apalagi mengingat waktu yang disediakan sedemikian pendek. Demikian juga berbeda dengan optimisme yang diyakini dikalangan pembinaan UMKM ditingkat pusat, kalangan pembina di daerah nampaknya menanggapi hal ini sebagai beban moral yang cukup berat tetapi harus dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada di daerah.

Dualisme pandangan tersebut melahirkan pertanyaan seberapa jauh koordinasi antara pusat dan daerah telah dilaksanakan dalam proses perencanaan program tersebut. Yang jelas terlihat adalah bahwa dukungan pemerintah pusat dalam bentuk prasarana, sarana dan permodalan tentunya untuk banyak daerah (terutama daerah miskin atau daerah yang PAD-nya rendah), belum mencukupi. Jadi apa yang harus dilakukan agar program tersebut paling tidak dapat mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Hasil Rapat Koordinasi Nasional

(Rakornas) di Bali bulan Agustus tahun 2006 yang lalu mengindikasikan adanya sejumlah permasalahan di daerah yang membutuhkan penyelesaian secara terkoordinir antara pusat dan daerah dan antar sektor. Rakornas tersebut memang telah mengeluarkan berbagai output yang berupa komitmen bersama antara instansi pusat dan daerah, tetapi sampai sekarang ini belum terlihat adanya penjabaran dari komitmen tersebut dalam berbebagai aksi nyata di lapang. Sangat disayangkan bila 26 butir permasalahan yang telah disepakati solusi pemecahannya daerah tersebut hilang begitu saja. Pada hal seandainya kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk program nyata, rasanya tidak sulit untuk mencapai target tumbuhnya enam juta wirausaha baru.

Tidak mudah untuk memprediksikan berapa sebenarnya jumlah wirausaha baru yang dapat ditumbuhkan melalui berbagai program yang oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kesulitan juga timbul karena sebagian orang yang berusaha dalam kelompok UMKM ini merasa tidak berkepentingan untuk mendaftarkan diri atau melakukan registrasi usahanya ke instansi terkait. Di beberapa tempat ditemui bahwa mereka takut melakukan registrasi karena menyangka akan dikenai pajak atau usahanya oleh satu atau lain sebab akan dinyatakan sebagai usaha ilegal. Dalam hal ini aspek penyuluhan dan sosialisasi menjadi hal penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah dicabutnya berbagai ketentuan, peraturan dan kebijakan yang membatasi ruang gerak dari UMKM tersebut. Hal ini nampaknya masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, terutama karena koordinasi dan kesa-

maan persepsi di antara instansi di tingkat pusat sendiri masih menjadi problema tersendiri.

Penumbuhan Usaha Baru (Konsepsi Strategi dan Model)

Pembangunan ekonomi nasional semakin mendesak dilakukan melalui pendekatan optimalitas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan pengembangan kegiatan-kegiatan UMKM. Diantaranya dengan memanfaatkan tenaga kerja yang masih menganggur (kurang lebih 20 juta tenaga kerja usia produktif). Namun demikian dengan mempelajari kelemahan-kelemahan dari tenaga kerja baik dari aspek pengetahuan keterampilan, pemilikan modal, ketersediaan sarana, ketersediaan peralatan dan ketersediaan pasar, maka masih dipertanyakan peluang terbangunnya usaha-usaha baru dari kelompok UMKM secara alamiah. Oleh sebab itu perlu campur tangan langsung dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya (*stake holders*), untuk membangun usaha-usaha baru dari kelompok UMKM. Penumbuhan usaha-usaha baru merupakan suatu proses yang terlebih dulu memerlukan berbagai masukan termasuk penetapan model pembangunannya yang sesuai dengan kondisi SDM calon UMKM. Demikian juga usaha ini memerlukan ketersediaan faktor-faktor pembangunan lainnya seperti dukungan modal, sarana pendukung, bahan baku (terutama bahan baku lokal), teknologi dan lain-lain secara memadai, yang kesemuanya tidak mungkin disediakan sendiri oleh calon pengusaha mikro dan usaha kecil.

Idealnya penumbuhan usaha baru (UB) UMKM memang terjadi secara alamiah sebagai bentuk perluasan usaha akibat

perubahan permintaan (*demand*) atas produk yang dihasilkan, maupun perubahan dari sisi penawaran. UB UMKM juga timbul sebagai derivasi (turunan) dari jenis usaha yang sudah ada, baik yang merupakan efek ke belakang (*back word*) maupun ke depannya (*fore word*). Namun demikian seperti telah dikemukakan pemicuan wirausaha baru di kalangan UMKM ini sering terkendala oleh berbagai faktor, baik faktor internal calon UMKM, maupun kondisi lingkungannya. Usaha pemerintah dan masyarakat sendiri (lembaga-lembaga non government maupun perorangan) untuk membuka UB UMKM juga sudah cukup banyak, tetapi sampai dengan sekarang belum terlihat keberhasilannya secara signifikan. Salah satu sebab lambatnya usaha menumbuhkan wirausaha baru ini adalah terbatasnya jumlah bantuan dari pemerintah dan belum ditemukannya model-model penumbuhan yang spesifik, yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam program tersebut secara menyeluruh.

Berbagai program yang telah dilaksanakan untuk menumbuhkan wirausaha baru baik jumlah maupun nilainya memang terlihat sudah cukup besar, tetapi dengan memperhatikan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang sedemikian banyak, jumlah tersebut menjadi kecil atau belum proporsional dengan tuntutan kebutuhan. Salah satu solusi pemecahan masalah ini (mencegah keterbatasan dan potensi SDM pemerintah) adalah dengan membangun model-model pertumbuhan wirausaha baru yang memungkinkan masyarakat sendiri dapat mengembangkannya secara mandiri.

Model-model pembangunan kegiatan UMKM, banyak yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, baik model-model

pembangunan lokal maupun yang diintroduksi dari luar seperti seperti model inkubator model kemitraan, model kerjasama usaha (*Franchise*) model keagenan dan model pendampingan. Dengan memperhatikan sifat-sifat setiap model penumbuhan usaha baru dan kondisi lapang akan terlihat bahwa model-model tersebut tidak dapat diaplikasikan secara agregatif untuk semua jenis usaha di setiap tempat dan setiap waktu. Dengan perkataan lain aplikasi model penumbuhan UMKM harus memperhatikan berbagai kondisi baik kondisi internal UMKM maupun kondisi lingkungan, karenanya aplikasi model ini harus dilakukan secara selektif.

Penumbuhan UMKM baru memang sudah merupakan sebuah komitmen yang sangat potensial dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini yang lebih penting lagi pelaksanaan alternatif ini secara langsung akan memperbaiki struktur perekonomian, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia yang secara langsung mengurangi pengangguran dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan perekonomian dunia. Usaha ini nampak baru dapat mencapai hasil yang memuaskan jika ditemukannya alternatif model-model penumbuhan yang secara selektif sesuai dengan potensi tersedia dan lingkungan dari tiap daerah dan dari tiap jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan

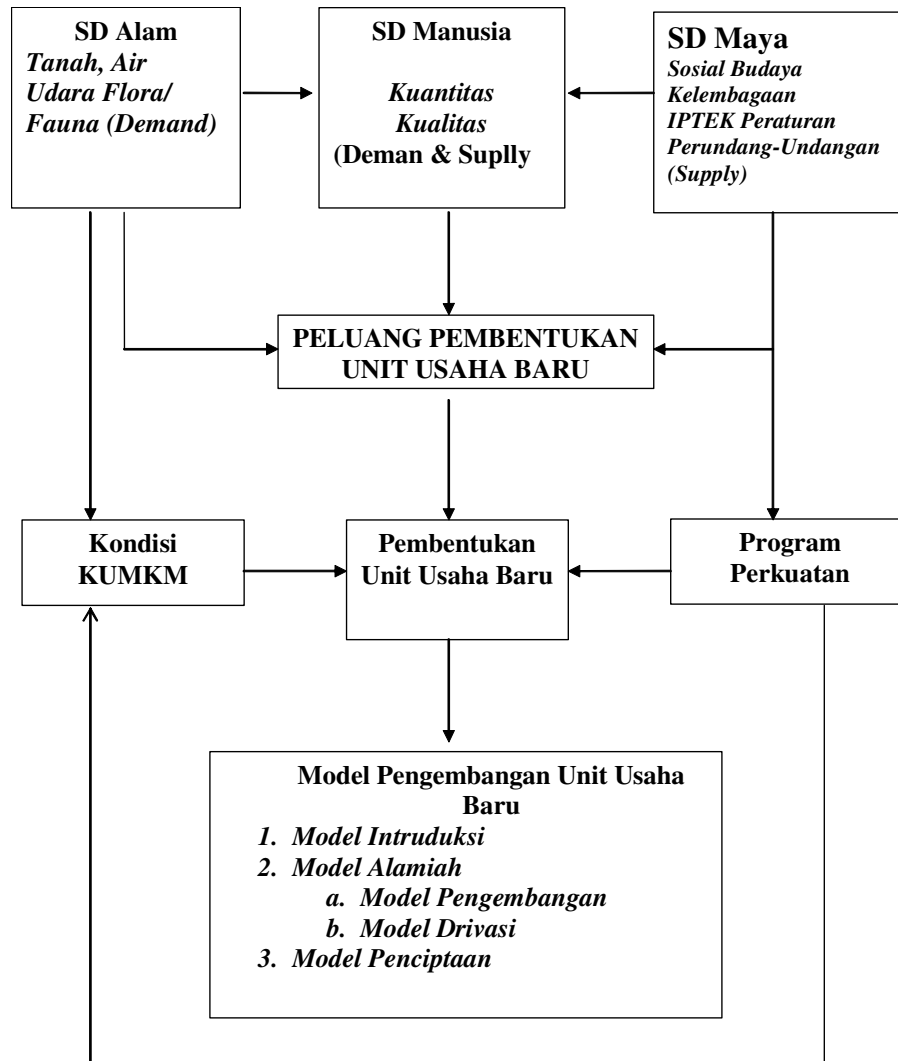
Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada hakikatnya, masih terdapat beberapa pertanyaan yang terkait dengan program penumbuhan UMKM, yaitu : a) Seberapa jauh keberhasilan penerapan model-model yang sudah ada

dapat mendukung pembangunan usaha baru dalam UMKM; b) Bagaimana kriteria dan sejauh mana model model tersebut berpotensi untuk diaplikasi dalam pembangunan UBUMKM, serta; c) Apakah diperlukan pembuatan model baru dan sejauh mana model yang akan disusun tersebut diprediksikan dapat mempercepat pembangunan UMKM. Untuk menjawab pertanyaan ini masih diperlukan adanya suatu penelitian lapang yang komprehensif. Penelitian tersebut harus dapat menjelaskan a) Keperluan menumbuhkan wirausaha baru UMKM sebagai dasar dalam membangun struktur perekonomian nasional yang secara normatif harus mengikutsertakan partisipasi semua warga negara. Argumen normatif tersebut didukung oleh konsep logika positif yang bersandar pada pendekatan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, terutama sumberdaya manusia dan sumber daya lokal lainnya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya maya; b) Peluang pembukaan UBUMKM baik yang bersumber dari SDM, SDA maupun sumberdaya maya adalah cukup besar. Dalam hal ini peluang usaha yang berasal dari sumberdaya maya masih banyak yang belum termanfaatkan padahal peluang ini sedemikian besar dan tidak terbatas selama masih terjadi pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta teknologi masih terus berkembang.; c) Penumbuhan UB UMKM merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerataan pendapatan dan pengembangan kemampuan ekonomi/kesejahteraan dari kelompok miskin, yang selama sering terpinggirkan (termarjinalkan) dan d) Pengembangan penumbuhan UB UMKM juga merupakan antisipasi terhadap kemungkinan semakin timpangnya struktur

perekonomian pada era pasar bebas yang akan datang yang lebih cenderung kearah kapitalisme.

Simulasi dan penyusunan model penumbuhan UMKM seperti pada bagan 1 ini dapat memperlihatkan kerangka dasar dari konsep yang akan diaplikasi dalam penyusunan strategi dasar untuk menumbuhkan wirausaha baru.

Dari bagan 1 tersebut nampak bahwa sekarang ini sudah ada berbagai model penumbuhan UB UMKM yang berlangsung secara alami maupun yang ditumbuhkan dengan bantuan pihak luar (baik pemerintah maupun masyarakat), dalam bentuk model penumbuhan introduksi, dan model penumbuhan lokal. Namun demikian, efektifitas dari tiap model tersebut masih belum diketahui



BAGAN 1. Kerangka Dasar Pengkajian Model Penumbuhan UB UMKM

dengan pasti dan masih terbuka peluang untuk membangun/menyusun model alternatif lainnya yang dalam kajian ini disebut sebagai model penciptaan.

Pada hakekatnya penyusunan model alternatif UB UMKM dan aplikasinya dalam penumbuhan usaha baru serta pengujian efektifitas dari model-model tersebut adalah terkait kondisi calon pelaku UB, kondisi lingkungan ekonomi dan sosialnya, serta kemajuan teknologi. Sedangkan dalam pengujian efektifitas setiap model tersebut perlu memperhatikan sifat-sifat dari tiap model. Dari pengetahuan tentang kondisi calon pelaksana usaha UB UMKM, kondisi lingkungan dan sifat-sifat model yang menjadi alternatif, dapat ditentukan kriteria model yang dinilai efektif untuk menumbuhkan UB UMKM. Adapun sifat-sifat model penumbuhan UB UMKM yang sudah ada sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Model Introduksi

- a) Sebagian besar merupakan introduksi dari negara maju.
- b) Skala usaha berkisar antara menengah sampai dengan besar.
- c) Produk Barang substitusi Impor.
- d) Peralatan semi modern sampai dengan modern.
- e) Potensi pengembangan terbatas, dan terikat pada komitmen bisnis dengan induknya.
- f) Penyebaran relatif sempit, sebagian besar hanya dapat dilakukan diperkotaan.
- g) Hampir tidak memerlukan program perkuatan.
- h) Persaingan ketat dan pasar cepat jenuh.

- i) Tidak/kurang memberikan respon positif bagi usaha di belakang maupun di depan.
- j) Penyerapan tenaga kerja relatif sedang (berdasarkan perkiraan investasi yang diperlukan per tenaga kerja (Capital/man).
- k) Contoh Waralaba, Hak Paten dan Keagenan.

2. Model Alamiah

a) Model pengembangan

- Merupakan pengembangan dari usaha yang sudah ada dan terbentuk karena adanya perubahan keseimbangan pasar baik dari sisi penawaran (demand side) maupun permintaan (supply side).
- Skala usaha relatif, tergantung nilai ekonomi barang dan keseimbangan pasar yang membentuk harga.
- Peralatan dan modal relatif, tergantung keseimbangan pasar, potensi barang, substitusi dan ketersediaan barang komplementernya, serta kemajuan teknologi produksinya.
- Bahan baku terutama bahan baku lokal yang bisa juga berasal dari efek ke belakang atau efek ke depan dari bidang usaha yang lain yang sudah ada sebelumnya.
- Prospek pengembangan cukup luas tergantung prospek penggunaan dan pasar, ketersediaan bahan baku, dan kemajuan teknologi.
- Penyebaran sangat luas baik diperkotaan maupun di pedesaan.

- Penyerapan tenaga kerja dari besar sampai sedang, tergantung pada teknologi yang digunakan dan skala usaha perusahaan.
- Respon terhadap kegiatan usaha kedepan maupun kebelakang cukup besar tergantung bahan baku dan teknologi yang digunakan.
- Umumnya masih memerlukan bantuan perkuatan dari semua aspeknya.
- Contohnya; Sebagian besar usaha bisnis UMKM baik yang mikro, usaha kecil.
- Maupun usaha menengah yang ada.

b) Model Derivasi

Merupakan model turunan sebagai akibat adanya dampak ke belakang (*back word effect*) ataupun dampak kedepan (*fore word effect*) dari jenis usaha yang sudah ada. Sebelumnya

- Sifat-sifat lainnya sama dengan model alamiah.
- Contohnya pembukaan pengolahan abu sekam (abu gosok) karena adanya industri pengolahan padi (*Back word effect*), atau pembukaan industri souvenir karena adanya pembukaan daerah wisata di tempat tersebut (*fore word effect*).

3. Model Penciptaan/Model Alternatif

- Model ini dibangun karena adanya potensi atau peluang usaha yang ditimbulkan dari aspek

sumberdaya baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya maya.

- Model ini harus dibangun karena pembentukannya secara alamiah terkendala oleh satu dan lain sebab. Penyebab dari tidak terbentuknya usaha tersebut bisa karena, belum adanya teknologi yang efektif /efisien, belum adanya permintaan pasar, tidak tersedia modal atau kurangnya informasi untuk ke 4 aspek tersebut.
- Aspek sumberdaya manusia bisa membuka usaha baru, baik karena jumlahnya yang banyak dan atau keahliannya misalnya usaha pengiriman tenaga kerja untuk PRT untuk TKI dan lain-lain.
- Aspek kualitas SDM membuka peluang usaha baru misalnya usaha jasa pertukangan industri kerajinan, perbengkelan dan lain.
- Sumberdaya alam membuka peluang usaha yang cukup luas baik dalam hal pemanfaatan sumberdaya air, sumberdaya daratan (tanah) sumberdaya udara maupun sumberdaya flora dan fauna
- Sumberdaya maya juga sangat menjanjikan usaha baru dari berbagai aspeknya misalnya aspek struktur dan kondisi perekonomian akan membuka peluang usaha perkreditan, perdagangan, jasa-jasa dan penyediaan kebutuhan.
- Aspek sosial juga menjanjikan peluang usaha terutama di sektor pariwisata, seni dan budaya serta kenyamanan hidup (Fitnes, pijat, Spa dan lain-lain).
- Penciptaan usaha baru memerlukan pemetaan potensi sumberdaya dan lingkungan sosial ekonomi regional /nasional.

- Percepatan pembukaan usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (Lembaga non Pemerintah).
- Untuk pengembangan usaha ini diperlukan program perkuatan.
- Penggunaan teknologi dan modal relatif tergantung tujuan pengembangannya apakah hanya untuk keuntungan ekonomi semata atau untuk tujuan lain seperti penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya tersedia dan lain-lain.
- Skala usaha dari usaha ini bervariasi dari usaha mikro sampai dengan usaha besar.
- Keberhasilan usaha ini ditentukan oleh semua faktor bisnis seperti ketersediaan sumberdaya, teknologi, modal, pasar dan manajemen
- Prospek pengembangannya cukup luas baik di perkotaan maupun di perdesaan
- Penggunaan modal, bahan baku dan teknologi disesuaikan dengan tujuan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin

Model pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan apakah menggunakan model-model yang sudah ada seperti model inkubator, dan model kemitraan.

Penutup

Dari gambaran yang telah dikemukakan untuk sementara dapat disimpulkan bahwa peluang pembukaan usaha baru masih cukup besar dan dapat terjadi dari ketiga sumberdaya tersedia (SDA, SDM

dan SD Maya). Demikian juga ketersediaan tenaga kerja calon pengusaha UMKM terutama para penganggur dari aspek jumlah maupun kualitasnya, pengalaman pendidikan dan keahlian bukan menjadi masalah sejauh pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terus berpihak pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (termasuk para penganggur). Sifat-sifat serta keberhasilan dari model-model penumbuhan usaha yang sudah ada baik yang produk lokal maupun model introduksi perlu dikaji secara komprehensif termasuk faktor-faktor yang diduga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari tiap model. Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi harus dipecahkan dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia. Demikian juga setiap peluang yang terbuka harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi calon wirausahawan yang mendapat bantuan langsung dari pemerintah dan stake holder, peluang pengembangan berbagai model yang sudah ada

Pada akhirnya dapat dikemukakan bahwa perspektif penciptaan enam juta wirausaha baru dalam kurun waktu lima tahun ini bukanlah suatu mimpi dan bukan juga suatu optimisme yang berlebihan. Cita-cita tersebut mungkin dapat diwujudkan bahkan mungkin lebih daripada target tersebut asalkan komitmen pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan UMKM tetap cukup kuat dan dilaksanakan secara konsekwen dan konsistensi yang tinggi.